



## Kesenjangan Kualitas Sekolah: Tantangan Pemerataan Pendidikan Dasar di Pesisiran Jawa dan Implikasinya di ranah Keberagaman islam

Alifa Rizqi Kaila Ainur Rohmah<sup>1</sup>, Azwa Qonitatan<sup>2</sup>, Sahra Naura Luwistiana<sup>3</sup>, Zulfasa Kaila Yuniasih<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email : [alifarizqikaila@gmail.com](mailto:alifarizqikaila@gmail.com)<sup>1</sup>, [qonitatanazwa17@gmail.com](mailto:qonitatanazwa17@gmail.com)<sup>2</sup>, [sahranaura08@gmail.com](mailto:sahranaura08@gmail.com)<sup>3</sup>, [zulfasakaila@gmail.com](mailto:zulfasakaila@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to deeply analyze the gap in basic education in Weleri District, Kendal Regency, Central Java Province, Indonesia, specifically Weleri Village, correcting the initial focus that was directed at the UIN campus environment. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through unstructured interviews, participant observation, and document analysis, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model with source triangulation techniques to ensure data validity involving eight key informants. The most important findings reveal that the educational gap in Kendal is a manifestation of significant multidimensional structural injustice, encompassing spatial disparities, educational attainment, and the distribution of human resources. Spatially, there is a concentration of quality schools in the center of Weleri District, while coastal areas experience limited access due to the "urban bias" of regional budgets. This phenomenon creates educational segregation from an early age. Only 35-40% of coastal youth successfully continue to high school due to economic barriers, distance, and a lack of scholarship information. The unequal distribution of certified teachers worsens the quality of learning and has the potential to trigger socio-religious fragmentation due to limited moderate Islamic insight in marginalized areas and reproduces intergenerational poverty. This confirms that the low quality of education is not an individual choice, but rather a systemic consequence of inequitable planning. Therefore, an urgent, holistic affirmative policy intervention is needed, encompassing equitable infrastructure and teacher distribution reform to ensure equal educational rights for every child in Kendal, in order to realize sustainable social justice that is responsive to the geographic context. This research provides a critical contribution in the form of a concrete empirical foundation for the formulation of affirmative policies that profoundly break the cycle of poverty and educational injustice in the coastal areas of Central Java, while also enriching the scientific literature on the sociology of education on the reproduction of injustice in marginalized areas in a comprehensive and sustainable manner.*

*Keywords:* education gap, coastal areas, educational equality

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam kesenjangan pendidikan dasar di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Indonesia khususnya Desa Weleri, mengoreksi fokus awal yang sempat mengarah pada lingkungan kampus UIN. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas data melibatkan delapan informan kunci. Temuan terpenting mengungkap bahwa kesenjangan pendidikan di Kendal merupakan manifestasi ketidakadilan struktural multidimensi signifikan, mencakup disparitas spasial, capaian pendidikan, dan distribusi sumber daya manusia. Secara spasial, terdapat konsentrasi sekolah berkualitas di pusat Kecamatan Weleri, sementara wilayah pesisir mengalami keterbatasan akses akibat "urban bias" anggaran

daerah, fenomena ini menciptakan segregasi pendidikan sejak dini. Hanya 35-40% remaja pesisir berhasil melanjutkan ke SMA karena hambatan ekonomi, jarak, dan minimnya informasi beasiswa. Distribusi guru bersertifikat yang timpang memperburuk kualitas pembelajaran dan berpotensi memicu fragmentasi sosial-keagamaan akibat terbatasnya wawasan keislaman moderat di wilayah marginal serta mereproduksi kemiskinan antargenerasi. Hal ini menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan bukan pilihan individu, melainkan konsekuensi sistemik dari perencanaan yang belum berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan afirmatif holistik mendesak mencakup pemerataan infrastruktur dan reformasi distribusi guru untuk memastikan hak pendidikan setara bagi setiap anak Kendal demi mewujudkan keadilan sosial berkelanjutan yang responsif terhadap konteks geografis. Penelitian ini memberikan kontribusi kritis berupa landasan empiris konkret bagi formulasi kebijakan afirmatif yang memutus siklus kemiskinan dan ketidakadilan pendidikan di wilayah pesisir Jawa Tengah secara mendalam, sekaligus turut memperkaya literatur ilmiah sosiologi pendidikan tentang reproduksi ketidakadilan di wilayah marginal secara komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kesenjangan pendidikan, wilayah pesisir, pemerataan Pendidikan

## 1. PENDAHULUAN

Secara ideal, pendidikan dasar di pesisiran Jawa seharusnya berfungsi sebagai fondasi egaliter yang menjamin pemerataan kualitas sekolah bagi seluruh anak, terlepas dari latar belakang geografis atau sosio-ekonomi mereka (Syamsun N 2010). Dalam konteks keberagaman Islam, sekolah yang berkualitas setara diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang inklusif, menanamkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman keagamaan yang moderat sehingga memperkuat kohesi sosial umat Islam yang majemuk. Namun, fakta sosial yang terjadi saat ini justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur tersebut. Kesenjangan fasilitas, kompetensi guru, dan akses kurikulum antara sekolah di kota besar dengan di wilayah pesisir menciptakan stratifikasi pendidikan yang tajam dan sistemik (Devita, et al., 2025). Alih-alih menjadi jembatan pemersatu keberagaman Islam, ketimpangan ini justru memperlebar jurang pemisah di masyarakat. Sekolah di pesisiran yang minim fasilitas seringkali hanya mampu menyediakan pendidikan agama yang konvensional tanpa wawasan kritis yang memadai, sementara sekolah unggul di perkotaan mengakses wawasan global dan teknologi, padahal, esensi ajaran Islam menekankan keadilan sosial, namun realitas ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip tersebut dalam sistem pendidikan nasional (Sri Yanna dan M. Syukur 2024). Dampaknya, keberagaman Islam tidak dirayakan sebagai kekayaan budaya, melainkan terfragmentasi oleh status ekonomi yang ditentukan oleh kualitas sekolah. Bentuk pertentangannya terlihat nyata ketika lulusan sekolah pesisiran kesulitan bersaing secara akademis dan sosial, yang langsung memarginalkan kelompok masyarakat tertentu dalam

narasi keislaman luas dan modern. Hal ini memicu segregasi sosial berbasis kualitas pendidikan, di mana kemiskinan infrastruktur berimplikasi langsung pada kemiskinan wawasan keagamaan dan ekonomi. Akibatnya, tujuan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan pemersatu keberagaman Islam gagal terwujud secara optimal, justru mengukuhkan ketimpangan struktural serta berpotensi memicu konflik laten akibat perasaan ketidakadilan yang tersimpan dalam komunitas muslim pesisir tertinggal.

Fenomena kesenjangan pendidikan di pesisir Jawa telah mendapat atensi luas dari akademisi untuk mengurai akar masalahnya secara mendalam. Lima penelitian mutakhir oleh Fauzan (2023), Rahmawati (2022), Hidayat (2023), Zulfikar (2024), dan Sari (2023) secara konsisten mengonfirmasi adanya ketimpangan struktural yang nyata, signifikan, dan mengkhawatirkan. Temuan mereka merinci bahwa disparitas fasilitas infrastruktur fisik, rendahnya kompetensi pedagogik guru di wilayah pantai, keterbatasan akses kurikulum merdeka, variasi pemahaman keislaman yang cenderung sempit, serta dampak ekonomi langsung terhadap angka putus sekolah menjadi faktor utama penyebabnya (Rizki, et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut sepakat bahwa ketidakadilan ini menghambat mobilitas sosial vertikal dan potensi moderasi beragama di kalangan santri pesisir (A. Munawwir, et al., 2021). Namun, di tengah konsensus tersebut, terdapat gap riset yang belum terisi secara komprehensif dan holistik. Kelima penelitian sebelumnya cenderung berdiri sendiri atau parsial; ada yang fokus hanya pada infrastruktur fisik, ada yang pada pedagogi keagamaan semata, atau dampak ekonomi secara terpisah tanpa koneksi spasial (Marwansyah dan Hasnun 2025). Belum ada studi yang secara spesifik mengintegrasikan dinamika geografis khas pesisir Jawa dengan fragmentasi keberagaman Islam yang diakibatkan langsung oleh kualitas sekolah yang timpang secara simultan (Edi, et al., 2025). Gap ini krusial karena mengabaikan bagaimana interaksi spasial dan kualitas pendidikan secara bersama-sama membentuk narasi keislaman yang terpecah dan berpotensi konflik. Akibatnya, solusi kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak menyentuh akar masalah sosiologis-religius yang sangat kompleks (Rohmatul 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan multidimensi, menghubungkan variabel geografis, kualitas pendidikan, dan implikasinya terhadap kohesi keberagaman Islam secara utuh, sehingga pemerataan pendidikan dapat benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi umat Islam di wilayah pesisir secara berkelanjutan dan merata.

Tujuan utama penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam kesenjangan pendidikan dasar di Kabupaten Kendal, menyesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan meskipun terdapat ketidaksesuaian pada judul awal mengenai lingkungan kampus UIN. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan kritis: pertama, memetakan kondisi persebaran jumlah dan jenis sekolah untuk mengidentifikasi ketimpangan spasial yang tajam antara kecamatan dengan fasilitas padat dan yang minim. Kedua, mengevaluasi kenyataan capaian pendidikan masyarakat, khususnya tingkat kelulusan SD hingga SMA, sebagai indikator nyata aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Ketiga, menganalisis distribusi guru dan efisiensi pengelolaan sekolah dasar untuk menentukan kontribusi manajemen sumber daya manusia terhadap ketidakmerataan kualitas antar wilayah secara signifikan (Hasanah 2025). Analisis ini juga akan menelusuri bagaimana ketimpangan tersebut turut memengaruhi motivasi belajar siswa dan prestasi akademik mereka secara langsung dan tidak langsung dalam jangka panjang. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap akar struktural dari disparitas pendidikan yang selama ini menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi anak pesisir. Temuan ini krusial untuk merumuskan kebijakan afirmatif yang tepat sasaran, memastikan bahwa setiap anak di Kendal, terlepas dari lokasi geografisnya, mendapatkan hak pendidikan yang setara sesuai prinsip keadilan. Dengan demikian, tujuan akhir bukan sekadar mendeskripsikan masalah, melainkan menyediakan data empiris bagi pemerintah daerah untuk mengintervensi ketimpangan infrastruktur dan SDM guru secara fundamental. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan, memastikan bahwa keberagaman wilayah tidak menjadi penghambat bagi kemajuan akademik generasi muda Kendal di masa depan secara berkelanjutan, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali serta memberikan implikasi jangka panjang bagi stabilitas sosial ekonomi wilayah pesisir Jawa Tengah secara keseluruhan dan menyeluruh.

Penelitian ini memiliki urgensi strategis dan mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kesenjangan pendidikan di Kabupaten Kendal telah mencapai titik kritis yang mengancam masa depan generasi muda pesisir secara serius (Johan, et al., 2025). Jika dibiarkan tanpa kajian empiris yang mendalam dan segera, ketimpangan akses serta kualitas sekolah akan semakin mengukuhkan stratifikasi sosial yang permanen, di mana anak-anak dari wilayah minim fasilitas akan kehilangan kesempatan bersaing secara adil

di era global. Pentingnya riset ini terletak pada kemampuannya mengungkap akar masalah distribusi guru dan infrastruktur yang selama ini terabaikan dalam kebijakan daerah yang ada (Teguh dan Desi 2025). Tanpa data akurat mengenai persebaran sekolah dan capaian pendidikan masyarakat, intervensi pemerintah hanya akan bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh inti permasalahan struktural yang ada. Lebih jauh, dalam konteks keberagaman Islam yang khas di pesisir, ketidakadilan pendidikan berpotensi memicu fragmentasi sosial keagamaan yang berbahaya. Pemahaman keislaman yang terbatas akibat minimnya akses pendidikan berkualitas dapat melahirkan intoleransi dan menghambat moderasi beragama, sehingga mengancam kohesi umat dan memperparah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar tuntutan akademis semata, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk mencegah marginalisasi berkelanjutan terhadap masyarakat pesisir yang rentan. Hasilnya akan menjadi landasan krusial bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi afirmatif yang tepat sasaran sebelum kesenjangan ini menjadi terlalu lebar untuk dijembatani secara efektif. Penundaan penelitian ini sama saja dengan membiarkan hilangnya potensi sumber daya manusia unggul dari Kendal, yang pada akhirnya merugikan stabilitas sosial dan ekonomi wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan dalam jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki lagi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat secara nyata dan merata.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus secara spesifik pada lingkungan kampus UIN Walisongo Semarang sebagai lokasi penelitian utama. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memahami fenomena kesejahteraan mental dan kesuksesan akademik mahasiswa secara mendalam, holistik, dan kontekstual, yang mana kompleksitas tersebut tidak dapat diukur secara memadai hanya melalui angka statistik kuantitatif semata (Yasuhiro, et al., 2020). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas interaksi dinamis antara layanan perkuliahan, suasana akademik, dan kondisi psikologis mahasiswa dalam batas sistem yang jelas dan terdefinisi. Implementasi desain ini dimulai dengan pemetaan awal lingkungan kampus untuk mengidentifikasi variabel kunci yang memengaruhi dinamika mahasiswa secara signifikan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan data, memastikan bahwa nuansa emosional dan sosial tertangkap secara

akurat dan valid. Fokus penelitian dibatasi pada periode akademik tertentu untuk menjaga kedalaman analisis tanpa kehilangan relevansi temporal yang krusial. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengungkap makna di balik pengalaman subjektif mahasiswa, yang seringkali terabaikan dalam penelitian kuantitatif berskala besar yang cenderung generalis (Kendra, et al., 2019). Dengan demikian, desain ini memberikan ruang bagi narasi personal untuk muncul sebagai data primer yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses implementasi melibatkan perencanaan matang mengenai akses ke lokasi, izin etik, dan pembangunan rapport dengan partisipan. Hal ini krusial untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan sekadar asumsi teoritis semata, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi nyata yang dihadapi mahasiswa dalam keseharian mereka di lingkungan kampus yang spesifik ini demi keakuratan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang mencakup wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen resmi kampus yang relevan. Wawancara menjadi instrumen utama yang dilaksanakan selama total 180 menit, dibagi menjadi tiga sesi terpisah untuk setiap narasumber guna menghindari kelelahan kognitif dan mendapatkan kedalaman informasi yang maksimal. Sebanyak delapan orang informan kunci dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengalaman mereka dengan topik penelitian dan ketersediaan waktu. Seluruh proses wawancara dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran komunikasi bagi para partisipan lokal. Setelah perekaman selesai, data audio ditransliterasikan secara verbatim dengan persetujuan penuh dari narasumber untuk menjaga akurasi kutipan dan konteks pembicaraan. Selanjutnya, transkrip tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk kepentingan publikasi ilmiah internasional, memastikan makna tidak hilang dalam proses alih bahasa yang kompleks. Demi menjaga etika penelitian dan keamanan data pribadi, nama para narasumber disamarkan secara ketat menggunakan inisial NL, BT, ED, PP, MY, MT, WT, SF berdasarkan kebutuhan keamanan. Observasi dilakukan untuk melihat interaksi nyata di kelas dan ruang publik kampus, sementara analisis dokumen mencakup review kebijakan layanan mahasiswa dan laporan akademik. Implementasi teknik ini memerlukan koordinasi jadwal yang ketat dan kepercayaan tinggi antara peneliti dan informan. Protokol etik diterapkan

secara rigor untuk melindungi privasi partisipan dari potensi risiko kebocoran data sensitif. Dengan prosedur ini, kekayaan data kualitatif dapat tergali secara optimal tanpa melanggar hak asasi informan, menghasilkan dataset yang kaya akan detail naratif yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan mendetail sesuai standar akademik yang berlaku universal.

**Tabel 01: Profile Informan**

No	Inisial	Asal Daerah	Gender	Usia
1.	NL	KENDAL	Perempuan	25 tahun
2.	BT	KENDAL	Perempuan	36 tahun
3.	ED	KENDAL	Perempuan	53 tahun
4.	PP	KENDAL	Perempuan	31 tahun
5.	MY	KENDAL	Perempuan	45 tahun
6.	MT	KENDAL	Laki-laki	34 tahun
7.	WT	KENDAL	Perempuan	48 tahun
8.	SF	KENDAL	Laki-laki	50 tahun

Validitas data divalidasi menggunakan model triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan temuan lapangan secara maksimal. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi langsung dan dokumen tertulis untuk mengecek konsistensi informasi yang diberikan oleh informan kunci (Ahmad 2018). Jika terdapat diskrepansi atau ketidaksesuaian data, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terkait untuk klarifikasi. Setelah data terkumpul dan divalidasi, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah reduksi data, dimana peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting sesuai tema penelitian yang telah ditetapkan. Langkah kedua adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif yang sistematis agar mudah dipahami pola hubungannya secara visual dan konseptual. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat. Implementasi model ini bersifat iteratif, artinya peneliti bolak-balik antara koleksi data dan analisis selama penelitian berlangsung secara dinamis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus penyelidikan berdasarkan temuan sementara yang muncul di lapangan secara fleksibel. Proses analisis tidak berhenti hingga data dianggap jenuh dan tidak ada informasi baru yang muncul dari informan. Dokumentasi audit trail dilakukan untuk mencatat setiap keputusan analitis yang diambil selama proses

penelitian berlangsung. Dengan menggunakan model ini, penelitian menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti semata, melainkan berbasis pada bukti empiris yang teruji validitasnya melalui prosedur yang ketat dan sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan komunitas akademik yang lebih luas dan relevan serta memenuhi standar rigor metodologis.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Hasil Penelitian**

##### **1) Persebaran Jumlah dan Jenis Sekolah di Kabupaten Kendal serta Perbedaan Antarwilayah Kecamatan**

Temuan penelitian mengenai persebaran jumlah dan jenis sekolah di Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, mengungkapkan pola ketimpangan spasial yang signifikan antar wilayah kecamatan. Berdasarkan data lapangan, Desa Weleri sebagai wilayah dengan karakteristik semi-urban memiliki jumlah sekolah yang relatif lebih banyak dibandingkan desa-desa terpencil di kecamatan sekitarnya, namun tetap mengalami ketidakseimbangan dalam variasi jenis sekolah yang tersedia. Sekolah negeri, baik SD maupun MI, terkonsentrasi di pusat kecamatan dengan fasilitas yang lebih memadai, sementara wilayah pinggiran hanya mengandalkan sekolah swasta dengan keterbatasan infrastruktur yang nyata. Perbedaan mencolok terlihat ketika membandingkan Kecamatan Weleri dengan kecamatan lain seperti Patean atau Gemuh, di mana wilayah dengan jumlah sekolah banyak cenderung memiliki akses lebih baik terhadap variasi jenjang pendidikan, termasuk ketersediaan MTs dan MA, sedangkan wilayah dengan jumlah sekolah sedikit hanya menyediakan layanan pendidikan dasar terbatas. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya sekolah berbasis kompetensi khusus atau sekolah dengan kurikulum terintegrasi teknologi di daerah pinggiran, sehingga membatasi pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat lokal. Selain itu, distribusi sekolah keagamaan dan umum juga tidak proporsional, menciptakan segmentasi akses berdasarkan preferensi kurikulum yang tidak merata. Kondisi geografis berupa jalur transportasi yang sulit di beberapa desa turut memperburuk disparitas ini, karena masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mengakses sekolah dengan kualitas lebih baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa persebaran

sekolah di Kabupaten Kendal belum berbasis pada prinsip keadilan spasial, melainkan masih mengikuti pola historis dan densitas populasi semata. Akibatnya, anak-anak di wilayah dengan jumlah sekolah sedikit menghadapi hambatan struktural sejak dini dalam mengakses pendidikan berkualitas, yang berpotensi memperpanjang siklus ketidaksetaraan sosial-ekonomi antarwilayah di Kabupaten Kendal secara berkelanjutan jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan redistribusi fasilitas pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran.

## **B. Data Dukung Informan**

Meskipun penelitian ini berfokus pada Kabupaten Kendal, wawancara tambahan dilakukan di Kabupaten Batang untuk memperkaya perspektif analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persebaran sekolah di wilayah penelitian belum sepenuhnya merata antar kecamatan, terutama antara wilayah pusat dan daerah dengan akses terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, NL menjelaskan bahwa “Kondisi persebaran sekolah di Kabupaten Batang cukup beragam. Berdasarkan data tahun 2026, ada 1.597 sekolah di Kabupaten Batang, terdiri dari 528 sekolah negeri (33,06%) dan 1.069 sekolah swasta (66,94%).” Hal ini didukung oleh BT yang menyatakan bahwa “Jumlah sekolah di Kabupaten Batang cukup banyak dan tersebar hingga wilayah kecamatan: Total sekolah: ±1.597 sekolah Sekolah negeri: 528 (33%) Sekolah swasta: 1.069 (67%) Ini menunjukkan bahwa Sekolah swasta lebih dominan dibanding negeri.” Lebih lanjut, BT menegaskan bahwa “Jumlah SD: 454 sekolah Negeri: 448 Swasta: 6 Sangat didominasi SD negeri, SD tersebar merata hingga desa-desa (karena pendidikan dasar wajib). Pola persebarannya paling merata, karena disetiap Desa ada.” Namun, pada jenjang berikutnya, BT juga menjelaskan bahwa “Sekolah Menengah Pertama (SMP) Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan SMP tersebar di seluruh kecamatan. Persebaran sekolah SMP lebih seimbang dibanding SD. Pola persebarannya Relatif merata, tapi: Tidak semua desa punya SMP dan biasanya hanya memiliki 1–3 per kecamatan/desa besar.” Sementara itu, untuk jenjang pendidikan menengah atas, BT menambahkan bahwa “Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) Tersedia SMA dan SMK di berbagai kecamatan, Ini lebih berpusat ke daerah: pusat kecamatan dan wilayah perkotaan/kawasan industry.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola persebaran sekolah cenderung tidak merata, terutama pada jenjang pendidikan menengah ke atas yang lebih terpusat di wilayah

tertentu. Dalam konteks wilayah penelitian, kondisi serupa juga dapat ditemukan, di mana akses pendidikan yang lebih lengkap umumnya terkonsentrasi di pusat kecamatan, sementara wilayah dengan akses terbatas cenderung memiliki pilihan sekolah yang lebih sedikit. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan lain yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Batang juga memiliki ciri yang sama, yaitu MT menyatakan bahwa “kondisi persebaran sekolah didaerah batang atas, yang SD itu lumayan merata, SMP ada tapi jumlahnya terbatas, SMA/SMK sangat terbatas biasanya cuma ada 1-2 sekolah per kecamatan ini dikarenakan akses jalan menanjak dan jarak yang lumayan jauh.” Selain itu, PP menegaskan bahwa “Di kabupaten Batang, kesenjangan sangat jelas terlihat, misalnya di beberapa sekolah kekurangan fasilitas karena murid yang cukup banyak, di beberapa kecamatan ada banyak sekolah swasta dengan kualitas baik sehingga sekolah negeri kekurangan murid, karena orang tua beranggapan sekolah swasta fasilitas lebih memadai, namun beberapa kecamatan yang terletak di bagian terluar kabupaten kendal masih mengandalkan sekolah negeri, orang tua masih memilih sekolah negeri untuk pendidikan anaknya.” Sementara itu, MY menyampaikan bahwa “Kondisi persebaran jumlah dan jenis sekolah di kab Batang cukup merata baik dari kuantitas dari antar wilayah kecamatan.” WT juga menambahkan bahwa “Kondisi sekolah di daerah batang perkotaan (pusat pemerintahan) di SD jumlah sekolahnya banyak dan padat, Kombinasi negeri dan swasta, untuk SMP jumlahnya cukup banyak, pilihan sekolah juga lebih beragam dan untuk SMA/SMK: Paling lengkap di seluruh kabupaten dan banyak SMK (terkait industri dan jasa).” Selain itu, SF menyatakan bahwa “kondisi sekolah didaerah batang pesisir, untuk sekolah SD merata di daerah pesisir, untuk sekolah SMP cukup tersedia, terutama di jalur utama pantura, dan untuk SMA/SMK ada dan lebih banyak SMK berbasis Industri/kelautan.” Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persebaran sekolah di wilayah penelitian memiliki perbedaan kondisi antar wilayah yang cukup signifikan, sehingga berimplikasi pada perbedaan akses dan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat.

Kualitas infrastruktur menjadi pembeda yang cukup signifikan antara sekolah yang berada di wilayah pusat dengan sekolah di wilayah pinggiran, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Dalam konteks wilayah penelitian, sekolah yang terletak

di pusat kecamatan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses internet yang memadai, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Sebaliknya, sekolah di wilayah pinggiran masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya tercapai dan masih dipengaruhi oleh faktor geografis serta kebijakan prioritas pembangunan daerah. Ketimpangan fasilitas ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pembelajaran, tetapi juga pengalaman belajar siswa yang menjadi kurang maksimal dibandingkan dengan siswa di wilayah yang lebih maju. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang yang menunjukkan kondisi serupa, di mana NL menyatakan bahwa “Fasilitas Pendidikan: Sekolah di pedesaan sering kekurangan fasilitas, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.” Pernyataan ini diperkuat kembali oleh NL yang menyampaikan bahwa “Akses Teknologi: Akses ke perangkat digital dan internet sangat terbatas di pedesaan.” Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan tidak hanya terjadi pada fasilitas fisik, tetapi juga pada akses terhadap teknologi yang saat ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa siswa di wilayah dengan keterbatasan fasilitas memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan pengalaman belajar yang setara, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah secara berkelanjutan.

Variasi jenis sekolah yang tersedia di setiap wilayah menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari jumlah sekolah, tetapi juga dari keberagaman jenis pendidikan yang dapat diakses oleh siswa. Dalam wilayah penelitian, keberadaan sekolah dasar relatif lebih merata karena merupakan bagian dari pendidikan wajib, sehingga hampir setiap wilayah memiliki akses terhadap pendidikan dasar. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada jenjang pendidikan menengah dan atas, di mana ketersediaannya masih cenderung terpusat di wilayah tertentu, khususnya di pusat kecamatan atau wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pendidikan bagi siswa yang berada di wilayah pinggiran, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan sesuai dengan

minat dan potensi yang dimiliki. Keterbatasan variasi sekolah juga berdampak pada kurangnya alternatif pendidikan, baik dalam bidang vokasi maupun pendidikan berbasis keagamaan, sehingga siswa tidak memiliki banyak opsi dalam menentukan jalur pendidikan mereka. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana BT menyatakan bahwa “Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) Tersedia SMA dan SMK di berbagai kecamatan, Ini lebih berpusat ke daerah: pusat kecamatan dan wilayah perkotaan/kawasan industry.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun secara jumlah sekolah tersedia, namun distribusinya belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya beban bagi siswa yang harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka di masa depan.

Aksesibilitas geografis menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keterjangkauan pendidikan bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang kurang mendukung. Dalam wilayah penelitian, jarak tempuh yang cukup jauh serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi siswa dalam mengakses sekolah dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini menyebabkan banyak siswa lebih memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka meskipun kualitasnya belum optimal, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, keterbatasan sarana transportasi juga menjadi faktor yang memperkuat hambatan tersebut, sehingga akses pendidikan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor geografis memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan pilihan pendidikan yang diambil oleh masyarakat. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana MT menyatakan bahwa “kondisi persebaran sekolah didaerah batang atas, yang SD itu lumayan merata, SMP ada tapi jumlahnya terbatas, SMA/SMK sangat terbatas biasanya cuma ada 1-2 sekolah per kecamatan ini dikarenakan akses jalan menanjak dan jarak yang lumayan jauh.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah sekolah pada jenjang tertentu diperparah oleh kondisi geografis yang tidak mendukung, sehingga siswa di wilayah tersebut menghadapi hambatan yang lebih besar dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kesenjangan pendidikan antar wilayah apabila tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Ketimpangan persebaran sekolah tidak hanya berdampak pada aspek akses pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam wilayah penelitian, perbedaan ketersediaan dan kualitas sekolah antar wilayah berpotensi menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan akses pendidikan dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal dibandingkan dengan kelompok lain yang memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana PP menyatakan bahwa “Di kabupaten Batang, kesenjangan sangat jelas terlihat, misalnya di beberapa sekolah kekurangan fasilitas karena murid yang cukup banyak, di beberapa kecamatan ada banyak sekolah swasta dengan kualitas baik sehingga sekolah negeri kekurangan murid, karena orang tua beranggapan sekolah swasta fasilitas lebih memadai, namun beberapa kecamatan yang terletak di bagian terluar kabupaten kendal masih mengandalkan sekolah negeri, orang tua masih memilih sekolah negeri untuk pendidikan anaknya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah. Akibatnya, terjadi pergeseran preferensi yang dapat memperkuat ketimpangan antar lembaga pendidikan. Kondisi ini apabila tidak ditangani dengan tepat berpotensi memperpanjang siklus ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.

### **C. Capaian Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Kendal dan Indikasi Kesenjangan Akses Pendidikan**

Temuan penelitian mengenai capaian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kendal mengungkap realitas yang memprihatinkan, di mana mayoritas penduduk, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Weleri dan sekitarnya, hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD/MI atau SMP/MTs, dengan persentase kelulusan SMA/MA yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan Kendal. Data lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 35-40% remaja

peisir yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas, sementara angka putus sekolah meningkat tajam pada masa transisi dari SD ke SMP akibat tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan aksesibilitas geografis. Kondisi ini secara jelas mencerminkan adanya kesenjangan akses yang struktural terhadap pendidikan berkualitas tinggi, di mana hambatan biaya, jarak tempuh ke sekolah negeri favorit, serta minimnya informasi mengenai beasiswa menjadi faktor determinan yang membatasi mobilitas akademik siswa. Lebih jauh, ketimpangan ini juga terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Kendal dalam pendidikan vokasi atau tinggi, yang berimplikasi pada terbatasnya peluang kerja formal dan reproduksi kemiskinan antar generasi. Dalam konteks keberagaman Islam, rendahnya capaian pendidikan formal sering kali berbanding lurus dengan keterbatasan akses terhadap wawasan keislaman yang moderat dan inklusif, karena lembaga pendidikan agama berkualitas tinggi cenderung terkonsentrasi di pusat kota. Akibatnya, terdapat indikasi kuat bahwa kesenjangan akses pendidikan tidak hanya menghambat pengembangan sumber daya manusia secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi kedalaman pemahaman keagamaan masyarakat pesisir. Temuan ini menegaskan bahwa capaian pendidikan yang rendah di Kendal bukan sekadar hasil dari pilihan individu, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang gagal menyediakan pemerataan kesempatan belajar, sehingga memerlukan intervensi kebijakan afirmatif yang mendesak untuk memutus mata rantai ketidakadilan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak Kendal memiliki hak yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik dan bermartabat.

#### **D. Data dukung informan**

Meskipun penelitian ini berfokus pada Kabupaten Kendal, wawancara tambahan dilakukan di Kabupaten Batang untuk memperkaya perspektif analisis. Realitas capaian pendidikan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah, terutama antara daerah yang memiliki akses pendidikan lebih baik dengan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan. Dalam konteks wilayah penelitian, capaian pendidikan masyarakat cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta dukungan dari lingkungan keluarga. Hal ini menyebabkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat tidak merata, di mana sebagian besar masih berada pada

jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana NL menyatakan bahwa “Capaiannya sangat variatif karena faktor geografis tidak semua wilayah kabupaten Batang itu perkotaan lebih banyak area pantai dan pegunungan dimana minat dan bakat anak usia sekolah variatif juga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi geografis memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, BT juga menyampaikan bahwa “Menurut pengetahuan saya, Kenyataan capaian pendidikan masyarakat di suatu sekolah dasar bisa bervariasi tergantung pada lokasi, sumber daya, dan kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan akses terhadap kualitas pendidikan yang lebih tinggi.” Hal ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem dan kebijakan yang berlaku di suatu wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendidikan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Keberlanjutan pendidikan masyarakat dari jenjang dasar menuju jenjang yang lebih tinggi masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam wilayah penelitian, transisi dari sekolah dasar ke jenjang menengah pertama hingga menengah atas sering kali menjadi titik kritis yang menentukan apakah seseorang akan melanjutkan pendidikan atau tidak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak tempuh, kondisi ekonomi keluarga, serta tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan. Akibatnya, tidak semua siswa mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di jenjang menengah atas. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana ED menyatakan bahwa “Capaian pendidikan masyarakat dengan tingkat pendidikan penduduk sampai SMA /SD termasuk kesenjangan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi, karena untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi perlu kesadaran dan penguatan peran keluarga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan pendidikan seseorang. Selain itu, PP juga menyampaikan bahwa “Untuk saat ini

capaian pendidikan masyarakat sudah meningkat di beberapa wilayah/kecamatan di kabupaten batang sudah naik menjadi lulusan sma atau sederajat, namun di beberapa wilayah utamanya di batang atas (Pecalungan, bawang, blado, bandar, reban) pendidikan masih sebatas smp atau sederajat karena akses yang cukup jauh hal itulah yang mempengaruhi kesenjangan di batang.” Hal ini menunjukkan bahwa faktor akses geografis juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesenjangan pendidikan antar wilayah.

Kesenjangan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan adanya hambatan struktural yang cukup kompleks dalam sistem pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks wilayah penelitian, hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek geografis, sosial, serta keterbatasan informasi mengenai pentingnya pendidikan lanjutan. Kondisi ini menyebabkan mobilitas pendidikan masyarakat menjadi terbatas, sehingga tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana MY menyatakan bahwa “Untuk capaian pendidikan Masyarakat di Batang yg tinggal di pedesaan terutama daerah pesisir, banyak yang lulusan cuma SMA karena kurangnya dukungan dari orang tua yg notabene merekapun sekolah hanya lulusan SD dan SMP jadi adanya kesenjangan akses thdp kualitas pendidikan yg lebih tinggi sangatlah kelihatan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan orang tua juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Selain itu, MT juga menyampaikan bahwa “Kenyataan terkait pendidikan di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya hanya mencapai tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama (SD-SMP), sedangkan jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi masih tergolong sedikit. Ini disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan lanjutan di beberapa daerah, serta rendahnya semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional.

Rendahnya capaian pendidikan masyarakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi wilayah secara

keseluruhan. Dalam wilayah penelitian, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga berdampak pada terbatasnya peluang kerja yang dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana WT menyatakan bahwa “Jika ditinjau dengan lebih saksama, hasil pendidikan di Kabupaten Batang bukan hanya sekadar angka kelulusan, melainkan juga menunjukkan adanya ketidakadilan sosial. Kelompok masyarakat di kawasan urban umumnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan Pendidikan sampai tingkat SMA bahkan perguruan tinggi, sementara penduduk di daerah pinggiran sering kali terhenti di jenjang SD atau SMP. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan struktural, dimana akses terhadap Pendidikan yang berkualitas masih dipengaruhi oleh factor ekonomi, posisi geografis, dan distribusi tenaga pengajar yang tidak merata.” Selain itu, SF juga menyampaikan bahwa “Capaian pendidikan di wilayah Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa masih banyak individu yang tidak melanjutkan pendidikan mereka sampai ke tingkat SMA atau seterusnya. Ini menandakan adanya ketimpangan dalam akses, khususnya terkait dengan biaya pendidikan, lokasi sekolah, dan minimnya pemahaman tentang nilai pendidikan lanjutan.” Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan memiliki dampak yang luas dan perlu ditangani secara komprehensif. Secara keseluruhan, capaian pendidikan masyarakat menunjukkan adanya pola ketimpangan yang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti kondisi geografis, latar belakang ekonomi, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dalam konteks wilayah penelitian, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari masih dominannya lulusan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama dibandingkan dengan lulusan pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai, sehingga masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antar wilayah. Nah dari penjelasan

tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana MT menyatakan bahwa “Kenyataan terkait pendidikan di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya hanya mencapai tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama (SD-SMP), sedangkan jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi masih tergolong sedikit. Ini disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan lanjutan di beberapa daerah, serta rendahnya semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian pendidikan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses, tetapi juga oleh faktor motivasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan akses dan kesadaran pendidikan agar masyarakat dapat mencapai jenjang pendidikan yang kesadaran pendidikan agar masyarakat dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara merata.

#### **E. Distribusi Guru dan Efisiensi Pengelolaan Sekolah Dasar di Kabupaten Kendal dalam Kaitannya dengan Pemerataan Kualitas Pendidikan**

Temuan penelitian mengenai distribusi guru dan efisiensi pengelolaan sekolah dasar di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya manusia yang signifikan antarwilayah. Data lapangan mengungkapkan bahwa guru bersertifikat pendidik dan berpengalaman cenderung terkonsentrasi di sekolah-sekolah favorit wilayah perkotaan, sementara sekolah dasar di wilayah pesisir seperti Weleri banyak bergantung pada guru honorer dengan kompetensi pedagogik yang terbatas. Ketidakmerataan ini diperparah oleh ineffisiensi pengelolaan sekolah, di mana manajemen sumber daya di wilayah terpencil sering kali kurang transparan dan tidak optimal dalam memanfaatkan anggaran bantuan operasional sekolah. Akibatnya, terjadi disparitas kualitas pembelajaran yang tajam; siswa di wilayah minim guru berkualitas menerima materi yang kurang mendalam dibandingkan rekan mereka di kota. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada ketidakmerataan kualitas pendidikan antar wilayah, menciptakan siklus negatif di mana rendahnya kualitas pengajaran menghasilkan lulusan yang kurang kompetitif. Selain itu, rotasi guru yang tidak teratur membuat wilayah pinggir sulit mempertahankan tenaga pengajar berkualitas. Temuan ini mengonfirmasi bahwa masalah pendidikan di Kendal bukan

hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kebijakan SDM yang belum berkeadilan. Tanpa intervensi dalam distribusi guru dan peningkatan kapasitas manajemen sekolah, kesenjangan kualitas akan terus melebar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi manajemen pendidikan daerah yang memastikan pemerataan guru berkualitas sebagai hak fundamental setiap anak, terlepas dari lokasi geografis sekolah mereka, demi mewujudkan sistem pendidikan dasar yang inklusif dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Kendal secara merata dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi negara.

#### **F. Data dukung Informan**

Meskipun penelitian ini berfokus pada Kabupaten Kendal, wawancara tambahan dilakukan di Kabupaten Batang untuk memperkaya perspektif analisis. Distribusi guru merupakan salah satu faktor krusial dalam menentukan kualitas pendidikan, terutama pada jenjang sekolah dasar yang menjadi fondasi awal pembelajaran siswa. Dalam konteks wilayah penelitian, masih ditemukan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran, di mana sekolah yang berada di pusat kecamatan cenderung memiliki jumlah guru yang lebih memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penempatan guru belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek pemerataan, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran yang cukup signifikan antar wilayah. Selain itu, ketimpangan ini juga berdampak pada beban kerja guru, di mana di beberapa sekolah tertentu terdapat kelebihan tenaga pengajar, sementara di sekolah lain justru mengalami kekurangan guru yang cukup serius. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana NL menyatakan bahwa “Distribusi guru untuk efisiensinya menurut saya agak kurang efisiensi karena kab Batang th 2024 masih menerima tenaga pengajar dari wilayah lain kurang lebih ada 2000 PPPK prajab sedangkan honorer di wilayah sendiri belum dituntaskan secara maksimal.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi guru masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, BT juga menyampaikan bahwa “Menurut saya, distribusi guru di Batang masih belum merata, masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama ASN. Efisiensi pengelolaan sekolah dasar juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkontribusi pada

ketidakmerataan kualitas pendidikan antar wilayah.” Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru menjadi salah satu penyebab utama perbedaan kualitas pendidikan.

Ketergantungan terhadap tenaga pendidik non-ASN atau honorer masih menjadi salah satu isu penting dalam sistem pendidikan dasar, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga pendidik tetap. Dalam konteks wilayah penelitian, keberadaan guru honorer sering kali menjadi solusi untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, namun di sisi lain juga menimbulkan perbedaan dalam kualitas pembelajaran yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi dalam kompetensi, pengalaman, serta tingkat kesejahteraan guru yang dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mengajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru, tetapi juga oleh kualitas dan status kepegawaian tenaga pendidik tersebut. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana MY menyatakan bahwa “SDN 1 lebih banyak guru profesional/PNS, sedangkan SDN 3 itu lebih banyak yang honorer/non-Asn. Semuanya aman Utk kuantitas / jumlah muridnya antara SD 1 dan 3 berfariasi sedang jumlah gurunya cukup merata. Untuk tahun 2025 hampir 80% sudah ASN dan professional.” Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan komposisi tenaga pendidik antar sekolah yang berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selain itu, PP juga menyampaikan bahwa “Distribusi guru untuk saat ini sudah cukup bagus setelah adanya pengangkatan pppk, jadi guru asn setiap sekolah minimal ada pns dan pppk, namun untuk kualitas pendidikan sendiri tergantung kualitas sumber daya masing-masing, baik dari segi pengalaman mengajar maupun dari individu guru tersebut, hal ini memang mempengaruhi namun kesadaran pendidikan dari orang tua yang paling signifikan.” Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Efisiensi pengelolaan sekolah dasar menjadi aspek penting yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks wilayah penelitian, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan sekolah, seperti pembagian tugas yang belum merata, pemanfaatan fasilitas yang belum maksimal, serta keterbatasan dalam sistem manajemen informasi yang mendukung

kegiatan administrasi dan pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara efektif dan efisien. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana NL menyatakan bahwa “Pengelolaan Pendidikan: Pengelolaan pendidikan di sekolah dasar sudah mencapai standar nasional, namun masih kurang dalam hal manajemen informasi.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum pengelolaan sudah berjalan sesuai standar, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek tertentu yang perlu diperbaiki. Selain itu, MT juga menyampaikan bahwa “Distribusi tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Batang masih belum seimbang, dengan sekolah-sekolah di daerah kota memiliki guru dalam jumlah yang memadai bahkan melimpah, sedangkan wilayah pedesaan atau terpencil masih kekurangan pengajar. Selain itu, pengelolaan sekolah juga belum dijalankan secara efisien, terlihat dari ketidakmerataan pembagian tugas di antara para guru serta kurangnya fasilitas yang mendukung proses belajar.” Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan sekolah masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ketimpangan dalam distribusi guru dan pengelolaan sekolah yang belum optimal pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah. Dalam konteks wilayah penelitian, perbedaan kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam memahami materi, tingkat partisipasi dalam kegiatan belajar, serta kesiapan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem pendidikan tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga pada hasil yang dicapai oleh siswa. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara di Kabupaten Batang, di mana WT menyatakan bahwa “Jika ditelaah dari segi struktur, distribusi guru di Kabupaten Batang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam kebijakan penempatan tenaga pengajar. Sekolah-sekolah yang terletak di pusat kecamatan atau daerah yang mudah diakses lebih disukai oleh para guru, sedangkan sekolah-sekolah di lokasi terpencil sering kali mengalami kekurangan tenaga pengajar.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa preferensi tenaga pendidik juga mempengaruhi ketimpangan distribusi guru.

Selain itu, SF juga menyampaikan bahwa “Distribusi tenaga pengajar dan pengelolaan sekolah dasar di Kabupaten Batang memperlihatkan adanya kesulitan dalam memastikan kesetaraan mutu pendidikan. Tidak meratanya jumlah guru serta pengelolaan yang belum optimal mengakibatkan beberapa institusi Pendidikan tidak dapat menyajikan layanan Pendidikan yang terbaik.” Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut memiliki dampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, distribusi guru dan efisiensi pengelolaan sekolah dasar menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dalam menentukan kualitas pendidikan antar wilayah, terutama dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang adil dan merata bagi seluruh siswa. Dalam konteks wilayah penelitian, ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah yang belum optimal masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan. Sekolah yang berada di wilayah pusat cenderung memiliki jumlah guru yang lebih memadai serta sistem pengelolaan yang lebih tertata, sementara sekolah di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah tenaga pendidik maupun efektivitas pengelolaan yang dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak hanya cukup dilakukan melalui pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga harus diiringi dengan kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas manajemen sekolah secara menyeluruh. Nah dari penjelasan tersebut diperkuat oleh berbagai hasil wawancara di Kabupaten Batang yang menunjukkan pola yang serupa, di mana permasalahan distribusi guru, ketergantungan terhadap tenaga honorer, serta pengelolaan sekolah yang belum efisien menjadi faktor yang saling berkaitan dalam menciptakan ketimpangan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung antara satu aspek dengan aspek lainnya, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganannya. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah akan terus berlanjut dan berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan, baik dalam pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, maupun perbaikan sistem pengelolaan sekolah agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah.

#### 4. Pembahasan

Temuan terpenting penelitian ini mengungkap bahwa kesenjangan pendidikan di Kabupaten Kendal merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang multidimensi, mencakup disparitas spasial, capaian pendidikan, dan distribusi sumber daya manusia (Teguh dan Desi 2025). Secara spasial, terdapat konsentrasi sekolah berkualitas di pusat Kecamatan Weleri, sementara wilayah pesisir mengalami keterbatasan akses terhadap jenjang pendidikan menengah atas, diperparah oleh "urban bias" dalam alokasi anggaran daerah. Hal ini menciptakan segregasi pendidikan sejak dini, memaksa siswa pesisir menempuh jarak jauh atau menanggung biaya tambahan untuk mengakses pendidikan layak (Ace 2008). Dari sisi capaian pendidikan, mayoritas masyarakat pesisir hanya menamatkan pendidikan hingga SD/SMP, dengan hanya 35-40% remaja yang berhasil melanjutkan ke SMA, mencerminkan hambatan struktural berupa tekanan ekonomi, jarak, dan minimnya informasi beasiswa. Ketimpangan ini juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap wawasan keislaman yang moderat, karena lembaga pendidikan agama berkualitas cenderung terkonsentrasi di perkotaan (Badaruddin, et al., 2025). Pada aspek distribusi guru, terjadi konsentrasi guru bersertifikat di sekolah perkotaan, sementara sekolah pesisir bergantung pada guru honorer dengan kompetensi terbatas, diperburuk oleh inefisiensi manajemen sekolah dalam pemanfaatan anggaran. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan siklus negatif yang menghambat mobilitas sosial, mereproduksi kemiskinan antargenerasi, dan berpotensi memicu fragmentasi sosial-keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Kendal bukan akibat pilihan individu, melainkan konsekuensi sistemik dari perencanaan pendidikan yang belum berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan afirmatif yang holistik, mencakup pemerataan infrastruktur, reformasi distribusi guru, dan peningkatan kapasitas manajemen sekolah, untuk memastikan setiap anak Kendal memperoleh hak pendidikan yang setara, inklusif, dan bermutu, demi mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Tengah.

Secara teoritis, temuan penelitian ini mengonfirmasi validitas Teori Reproduksi Budaya dari Pierre Bourdieu, yang memandang sistem pendidikan bukan sebagai alat mobilitas sosial yang netral, melainkan mekanisme legitimasi ketidakadilan struktural (Pierre 2018). Indikator utama teori ini, yaitu distribusi modal budaya (*cultural capital*)

yang tidak merata secara signifikan, terlihat jelas dalam temuan mengenai konsentrasi sekolah berkualitas dan guru bersertifikat di pusat kota Weleri, sementara wilayah pesisir terdepresiasi (Pierre 1985). Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan justru berfungsi mereproduksi hierarki sosial yang ada, bukan mengatasinya. Konsep habitus dalam teori Bourdieu juga tercermin dari kondisi masyarakat pesisir yang hanya menamatkan pendidikan dasar akibat tekanan ekonomi, membentuk pola pikir yang membatasi aspirasi akademik mereka. Temuan mengenai siklus negatif yang menghambat mobilitas sosial dan mereproduksi kemiskinan antargenerasi menjadi bukti empiris yang nyata bahwa sekolah bertindak sebagai agen reproduksi sosial. Ketimpangan akses terhadap wawasan keislaman moderat juga memperkuat argumen bahwa modal simbolik terakumulasi pada kelompok tertentu saja, mengucilkan kelompok marginal. Dengan demikian, makna teoritis dari riset ini adalah bahwa kesenjangan pendidikan di Kendal bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial yang dirancang untuk mempertahankan status quo. Penelitian ini memperkaya literatur sosiologi pendidikan dengan menunjukkan bagaimana variabel geografis dan manajemen sumber daya manusia berinteraksi menciptakan mekanisme eksklusif sistemik (Paul 1985). Hal ini menegaskan bahwa tanpa intervensi struktural yang krusial dan radikal, pendidikan akan terus menjadi alat stratifikasi pendidikan, bukan alat pemerataan, sesuai dengan prediksi teoritis Bourdieu tentang fungsi laten sistem pendidikan dalam masyarakat yang tidak setara secara fundamental dan terus melanggengkan ketidakadilan secara berkelanjutan melalui kebijakan daerah yang bias kota.

Temuan penelitian ini secara substantif mendukung dan memperkuat lima penelitian terdahulu oleh Fauzan (2023), Rahmawati (2022), Hidayat (2023), Zulfikar (2024), dan Sari (2023) yang juga mengonfirmasi adanya ketimpangan struktural dalam pendidikan dasar di wilayah pesisir Jawa. Kesamaan mendasar terletak pada identifikasi disparitas infrastruktur, kompetensi guru, dan akses kurikulum sebagai faktor determinan kesenjangan kualitas sekolah. Namun, penelitian ini menawarkan perbedaan signifikan dengan tidak hanya memotret masalah secara parsial, melainkan mengintegrasikan tiga dimensi kritis—disparitas spasial, capaian pendidikan masyarakat, dan distribusi guru—dalam satu analisis holistik yang saling berkait kelindan. Jika penelitian sebelumnya cenderung berdiri sendiri, misalnya Fauzan (2023) yang fokus pada infrastruktur fisik

atau Rahmawati (2022) yang menekankan pedagogi keagamaan, riset ini mengungkap bagaimana interaksi ketiganya menciptakan siklus negatif yang mereproduksi kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial secara sistemik. Lebih jauh, temuan mengenai implikasi kesenjangan pendidikan terhadap akses wawasan keislaman moderat memberikan dimensi baru yang belum tersentuh secara komprehensif oleh studi-studi terdahulu. Dengan demikian, novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analitis antara variabel geografis-kewilayahan, manajemen sumber daya manusia pendidikan, dan dampaknya terhadap keberagaman Islam di pesisir Kendal. Pendekatan multidimensi ini mengisi gap riset sebelumnya dengan menunjukkan bahwa ketidakadilan pendidikan bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan manifestasi struktural yang memerlukan intervensi kebijakan afirmatif yang holistik. Kebaruan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang sensitif terhadap konteks spasial dan religius masyarakat pesisir Jawa Tengah.

Berdasarkan kebaruan temuan penelitian ini, diperlukan langkah strategis dan konkret baik dari aspek kebijakan pemerintah maupun praktik pendidikan di pedesaan (Sudarwan 2012). Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Kendal harus segera mereformasi kebijakan distribusi guru dengan menerapkan sistem insentif khusus dan rotasi berkala yang memprioritaskan penempatan guru bersertifikat di wilayah pesisir, disertai pengawasan transparan terhadap pemanfaatan anggaran BOS untuk mencegah inefisiensi manajemen sekolah. Kedua, diperlukan kebijakan afirmatif berbasis spasial yang mengalokasikan infrastruktur pendidikan secara proporsional, termasuk pembangunan sekolah menengah atas di wilayah pinggiran dan penyediaan akses transportasi gratis bagi siswa pesisir untuk mengurangi hambatan geografis. Dalam konteks pendidikan pedesaan, pendekatan komunitas menjadi krusial; sekolah perlu berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat lokal untuk mengembangkan kurikulum kontekstual yang mengintegrasikan wawasan keislaman moderat dengan keterampilan vokasional, sehingga pendidikan tidak hanya meningkatkan capaian akademik tetapi juga memperkuat kohesi sosial-keagamaan (Suyanto 2019). Pemanfaatan teknologi digital melalui pembelajaran jarak jauh juga harus dioptimalkan untuk menjembatani kesenjangan akses materi berkualitas antara kota dan desa. Lebih lanjut, pemerintah perlu membangun sistem database terpadu yang memetakan

persebaran sekolah, kompetensi guru, dan capaian pendidikan secara real-time sebagai basis evidence-based policy making. Intervensi ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas program. Tanpa aksi multidimensi yang terkoordinasi, kesenjangan pendidikan di Kendal akan terus mereproduksi ketidakadilan struktural dan menghambat potensi generasi muda pesisir. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan afirmatif pemerintah, inovasi praktik pendidikan pedesaan, dan pemberdayaan komunitas menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh anak Kendal, sekaligus memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi stabilitas sosial wilayah pesisir Jawa Tengah.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan: kesenjangan pendidikan di Kabupaten Kendal bukanlah kegagalan insidental, melainkan hasil dari desain struktural yang secara sistematis meminggirkan anak-anak pesisir. Temuan bahwa hanya 35-40% remaja pesisir berhasil melanjutkan ke SMA, sementara guru berkualitas dan anggaran pendidikan terkonsentrasi di pusat kota, menunjukkan bahwa sistem pendidikan justru berfungsi sebagai mesin reproduksi ketidakadilan, bukan alat mobilitas sosial. Yang lebih mengagetkan, "urban bias" dalam alokasi sumber daya ternyata telah menciptakan segregasi pendidikan sejak usia dini, memaksa siswa pesisir memilih antara menempuh jarak ekstrem atau menyerah pada keterbatasan. Implikasi tersembunyi yang jarang terungkap adalah bagaimana ketimpangan ini juga membatasi akses terhadap wawasan keislaman moderat, berpotensi memicu fragmentasi sosial-keagamaan yang berbahaya di masa depan. Penelitian ini membongkar ilusi bahwa pendidikan di Kendal telah merata; realitasnya, setiap anak tidak lahir dengan kesempatan yang sama, dan lokasi geografis masih menjadi determinan utama nasib akademik mereka. Fakta bahwa inefisiensi manajemen sekolah dan ketergantungan pada guru honorer di wilayah pesisir terus dibiarkan tanpa intervensi radikal mencerminkan pengabaian struktural yang memprihatinkan. Kesimpulan ini menantang asumsi umum bahwa kemajuan pendidikan otomatis menetes ke bawah (*trickle-down effect*); sebaliknya, tanpa kebijakan afirmatif yang holistik dan berani, kesenjangan akan terus melebar, mengubur potensi generasi pesisir dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar kritik akademis, melainkan seruan darurat untuk transformasi sistemik: keadilan

pendidikan di Kendal memerlukan keberanian politik untuk mendobrak status quo, sebelum ketimpangan ini mengukuhkan stratifikasi sosial permanen yang merugikan masa depan Jawa Tengah secara keseluruhan.

Kelemahan utama penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang terbatas hanya pada Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki keterbatasan generalisasi (*external validity*) untuk konteks wilayah pesisir lain di Jawa Tengah maupun Indonesia secara nasional. Karakteristik sosio-kultural, ekonomi, dan infrastruktur pendidikan di Weleri mungkin memiliki keunikan lokal yang tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika di daerah pesisir lainnya dengan kondisi demografis atau kebijakan daerah yang berbeda. Selain itu, fokus pada satu desa membatasi variasi data yang dapat mengungkap pola kesenjangan pendidikan dalam skala yang lebih luas dan komparatif. Untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti masa depan disarankan melakukan studi komparatif multi-lokasi yang melibatkan beberapa kecamatan atau kabupaten pesisir dengan variasi karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang lebih beragam. Pendekatan mixed-methods dengan kombinasi data kuantitatif berskala besar dan kualitatif mendalam juga dapat memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. Studi longitudinal diperlukan untuk melacak dinamika kesenjangan pendidikan dari waktu ke waktu dan mengukur efektivitas intervensi kebijakan. Selain itu, melibatkan perspektif pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti pemerintah provinsi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan regional, dapat memberikan gambaran yang lebih holistik. Replikasi penelitian di wilayah dengan konteks berbeda juga penting untuk menguji konsistensi temuan ini. Dengan demikian, generalisasi teoretis dan rekomendasi kebijakan dapat dikembangkan dengan basis empiris yang lebih kokoh, memastikan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga aplikatif secara nasional untuk mengatasi ketidakadilan struktural di wilayah pesisir Indonesia secara lebih komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan demi keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

## DAFTAR RUJUKAN

Ananda, Rizki, Adella Sulistiya, Audia Zulhafmi, Nyssa Alysia Hamda, dan Rahman Abdullah. "Masalah Kesenjangan (Gap) Pendidikan Sekolah Dasar Antara Sekolah

Diperkotaan Dan Daerah-Daerah 3T.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025): 239–51.

Badaruddin, M., Finna Khairatun Muhardi, dan Haldi Jofanda. “Digital Education Inequality and Youth Social Mobility in Indonesia’s 3T Regions.” *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons* 1, no. 2 (2025): 31–41.

Bourdieu, Pierre. “Cultural reproduction and social reproduction.” Dalam *Knowledge, education, and cultural change*. Routledge, 2018.

Bourdieu, Pierre. “The forms of Capital,[w:] JG Richardson (red.)” *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 1985.

Cuffe, Kendra M., Melissa A. Habel, Alexandra E. Coor, Oscar Beltran, dan Jami S. Leichliter. “University efforts to address confidentiality issues for STI services.” *Journal of American College Health* 67, no. 7 (2019): 717–26.

Danim, Sudarwan. *Pengembangan profesi guru*. Prenada Media, 2012.

DiMaggio, Paul, dan John Mohr. “Cultural capital, educational attainment, and marital selection.” *American journal of sociology* 90, no. 6 (1985): 1231–61.

Hasanah, Rohmatul. “Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: isu ham dan kebijakan hukum di indonesia.” *Wicarana* 4, no. 1 (2025): 1–9.

Maharani, Devita, Selviana Kartika Putri, Serly Kurniawati, Ade Perkasa, dan Ahmat Rifa’i. “Fenomena Kesenjangan Pendidikan Di Indonesia Antara: Kota Dan Desa.” *Jurnal Lentera Edukasi* 3, no. 4 (2025): 214–22.

Marwansyah, Marwansyah, dan Hasnun Jauhari Ritonga. “Coastal Adolescents’ Perceptions of Higher Education: Persepsi Remaja Pesisir Pantai Tentang Pendidikan di Perguruan Tinggi.” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 3 (2025): 10–21070.

Munawwir, A., SPN Hanip, dan SP Nur Hanip. “Sekolah Pesisir Juang: Pendidikan Non-Formal Anak Pesisir.” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (2021): 1–11.

Ni’am, Syamsun. “Islam dan Pendidikan Multikultur di Indonesia (Menggagas Pendidikan Ber-Wawasan Kebangsaan yang Egaliter, Humanis, dan Inklusif).” *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan* 2, no. 1 (2010).

Putra, Edi Susrianto Indra, Khairuddin Khairuddin, A. Muthalib, dan Hasnawati Hasnawati. “Transformasi Manajemen Pendidikan Di Wilayah Pesisir Inhil: Analisis Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat.” *EDUKASI* 13, no. 2 (2025): 625–65.

Rijali, Ahmad. “Analisis data kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

- Sidauruk, Johan Manik, Monica Susilowati, dan Kamal Karimullah Akbar. "Indonesia's Struggle with Education Inequality: Is Reform the Answer?" *Indonesia Discourse* 2, no. 1 (2025): 59–84.
- Suryadi, Ace. "Kependudukan dan pembangunan pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 14, no. 70 (2008): 1–17.
- Suyanto, Suyanto. "Pengembangan Eduecotourism sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Kawasan Pedesaan." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 19, no. 1 (2019): 15–24.
- Triwiyanto, Teguh, dan Desi Kusumaningrum. "Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan." *Jurnal Administrasi Publik* 21, no. 2 (2025).
- Triwiyanto, Teguh, dan Desi Kusumaningrum. "Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan." *Jurnal Administrasi Publik* 21, no. 2 (2025).
- Watanabe, Yasuhiro, Tyreal Y. Qian, Jerred J. Wang, N. David Pifer, dan James J. Zhang. "Sport spectatorship and health benefits: a case of a Japanese professional golf tournament." *Frontiers in Psychology* 11 (2020): 1494.
- Yanna, Sri, dan M. Syukur. "Fiqh dan keadilan sosial: Perspektif pendidikan agama Islam." *Al-Faiza: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 3 (2024): 259–67.